



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IBNU HARJIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **662705**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.085.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m²/460 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/225 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 736 m²/736 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 4713 m²/4713 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2984 m²/2984 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **210.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI GMT/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.332.200.000
III. HUTANG	Rp.	105.300.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.226.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.